

### BAB III

#### FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI DIY

##### A. FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN SUARA PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Study kasus: Di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemilu 2009

Pada bab ini akan membicarakan tentang factor penyebab penurunan suara partai kebangkitan bangsa khususnya yang terjadi di daerah istimewa yogyakarta dalam pemilu 2009, setelah penulis melakukan kajian yang mendalam dan menganalisa data data yang di peroleh baik itu data primer maupun sekunder, penulis berkeyakinan bahwa factor penyebab penurunan suara partai kebangkitan bangsa khususnya yang terjadi di daerah istimewa yogyakarta dalam pemilu 2009 tidak dapat di lepaskan dari permasalahan internal maupun eksternal yang membelengu partai kebangkitan bangsa ini ketika menyongsong pemilu 2009 lalu. Adapun yang di maksud *permasalahan eksternal adalah* (a) factor popularitas SBY dan Democrat, (b) Perilaku pemilih yang sangat pragmatis pada pemilu 2009 semisal masalah money politik.(c) system pemilu 2009 (berkaitan dengan UU pemilu No 10 tahun 2008 dan keputusan MK tentang pemberlakuan sistem suara terbanyak). Sedangkan *permasalahan internal adalah*. (a) konflik di dalam internal PKB sendiri, (b) Eksodus besar-besaran para tokoh PKB ke PKNU dan beberapa partai lain, (c) Kurangnya komunikasi dan konsolidasi dari jajaran internal pengurus PKB mulai dari DPW-DPC hingga pengurus ranting, yang berimbas pada kinerja partai dan caleg dari PKB yang

tidak masive dan terkesan sporadis ketika meng hadapi pemilu 2009.(d) Ketidak mampuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik dan anggota dewan dari PKB dalam menjawab ekpektasi –harapan- dari masyarakat<sup>91</sup> (e) Golongan putih atau golongan masarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu 2009

## **1. Faktor Eksternal**

### **a. Popularitas SBY dan Partai Demokrat**

Kalau kita menganalisis lebih jauh Apa di balik sukses melejitnya Partai Demokrat, Jawabnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Factor, yang merupakan kombinasi performa politik sebagai presiden dan juga sebagai Ketua Pembina Partai Demokrat<sup>92</sup>.

Rangkaian kebijakan Presiden SBY yang banyak mengundang simpati pemilih mulai penggal kedua 2008 adalah kebijakan penurunan harga BBM sebanyak dua kali akibat merosotnya harga minyak di pasaran internasional<sup>93</sup>.

Walaupun penurunan harga itu karena faktor keharusan akibat menurunnya harga minyak dunia, sebagian dari masyarakat menilai karena “kebaikan hati” SBY.

Korelasi antara pasang-surut dukungan rakyat terhadap SBY dan kebijakan naik-turun harga BBM, bisa dilihat dari hampir semua lembaga survei. Ketika menaikkan harga BBM hingga Rp 6.500 per liter, tingkat kepuasan rakyat terhadap

<sup>91</sup> Hasil diskusi dan wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), ketua dan sekretaris organ kepemudaan PKB( garda bangsa)-yuniono budi S. dan astopo di kantor DPW PKB pada 25 november 2009

<sup>92</sup> Magazine dunia-kita *Di Balik Melambungnya Suara Partai Demokrat* edisi ke-183 - 18 April 2009 dalam <http://www.dunia-kita.com/183.pdf>

<sup>93</sup> Ibid.,

SBY menyusut 27 persen. Bahkan pada periode itu, mayoritas lembaga survei memperlihatkan popularitas SBY mulai dikalahkan Ketua DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Tetapi sewaktu menurunkan harga BBM menjelang akhir 2008, tingkat kepuasan rakyat terhadap kebijakan Pemerintah SBY menanjak hingga lebih 68 persen, dan popularitasnya kembali mengungguli Megawati.

Kebijakan lain yang tampaknya ikut mendorong meroketnya suara Partai Demokrat adalah pemberantasan Korupsi. Walaupun pemberantasan korupsi sebenarnya produk keputusan yang bersifat sistemik, dan bukan hasil kerja personal seorang presiden, tapi lagi-lagi rakyat melihatnya sebagai bagian dari niat baik (good will) Presiden SBY. Salah satu buktinya adalah penahanan besan SBY dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Sepanjang periode pemerintahannya, juga banyak anggota DPR yang ditangkap karena kasus dugaan korupsi<sup>94</sup>.

Di bidang ekonomi, kebijakan Bantuan Langsung Tunai dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, ikut mendulang simpati masyarakat, terutama kaum miskin. Inilah kebijakan yang menjadi faktor utama meningkatnya suara Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Hal ini juga yang menurut penulis menjadi salah satu faktor penyebab penurunan suara bagi partai PKB secara nasional maupun di DIY mengingat banyak sekali konstituen PKB berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan menengah.

---

<sup>94</sup> Ibid.,

Kendati SBY kini adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, tetapi karena sedari awal kelahiran parpol itu, ditambah iklan Demokrat yang selalu mempersonifikasikan dengan diri SBY, masyarakat pun selalu menganggap mantan Kepala Staf Teritorial TNI itu adalah Partai Demokrat, demikian pula sebaliknya. Bahkan sebagian besar masyarakat pasti menganggap pimpinan Partai Demokrat adalah SBY, bukannya Subur Budhisantoso di masa lalu, atau Hadi Utomo di masa pra pemilu 2009 dan anas urbaningrum pasca pemilu 2009.

- **KARISMA & KEBIJAKAN**<sup>95</sup>

Kuatnya faktor SBY untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilu 2009, juga tak lepas dari budaya politik patronase dalam arus besar pembentukan perilaku memilih di Indonesia.

Di negara kita, penempatan pemimpin partai sebagai pertimbangan memilih, tampaknya lebih didasarkan pada karisma atau popularitas tokoh daripada evaluasi rasional terhadap tokoh tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan emosional lebih mengemuka dalam penentuan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap pemimpin parpol, daripada kapasitas pribadi yang sesungguhnya.

Dalam kerangka besar teori perilaku memilih, pertimbangan tokoh yang ditampilkan --yang oleh Pomper disebut sebagai variabel CE (Candidate Evaluation)- termasuk dalam kelompok pendekatan rasional. Fenomena ini bisa menjelaskan

---

<sup>95</sup> Ibid, halm 5



yang ditempuh untuk memenangi pemilihan, atau isu-isu panas yang diperdebatkan. Penilaian personal yang dipengaruhi kuat oleh media ini, diam-diam bisa berdampak pada pengurangan jumlah suara bagi pihak yang kalah.

Ulasan dini seputar pemilu atau laporan berdasarkan survei secara random, dapat memperkuat penilaian masyarakat, terutama tentang siapakah yang akan menjadi pemenang, dan sebaliknya mendorong terbentuknya spiral silence di antara pihak yang merasa kalah.

Faktor komunikasi media itu pula yang membuat Partai Demokrat dan Golkar bernasib beda, meskipun memiliki kesamaan sebagai partai incumbent dan sama-sama memiliki keuangan yang melimpah. Terbukti, perolehan suara Golkar merosot lumayan tajam, sekitar 5 persen, dibandingkan Pemilu 2004.

Lantas apa keterkaitan faktor popularitas SBY dan kemenangan demokrat terhadap faktor penyebab penurunan suara partai kebangkitan bangsa?

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris DPW PKB, apakah ada pengaruhnya faktor demokrat dan SBY dalam penurunan suara PKB mereka mengatakan<sup>97</sup>

“Secara pastinya itu belum tentu karena memerlukan kajian dan penelitian yang mendalam. Namun menurut saya itu ada benarnya, karena Kinerja partai politik itu sejauh mana kemampuan partai politik membuat kebijakan yang berorientasi atau berkaitan langsung dengan kepentingan masarakat, nah masarakat ini kan sangat farian. Tetapi Kalo di lihat bahwa yang mampu menjawab persoalan kebutuhan ekonomi maka akan di respon oleh masyarakat. Kalau dulu kaitanya dengan BLT sebagai program

---

<sup>97</sup> wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), di lakukan di kantor DPW PKB pada hari kamis 28 oktober 2010

pemerintah dalam hal ini pemerintahan SBY saat itu sedang berkuasa, maka faktanya juga benar, SBY terlepas dari kontroversi permasalahan DPT dan permasalahan pemerintah lainnya namun tetap saja masyarakat menganggap bahwa SBY berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, impeknya bagi partai demokrat yang merupakan partainya SBY adalah kemenangan lebih dari 20% pada pemilu 2009 atau meningkat kurang lebih 300% dari pemilu 2004”

Setelah menganalisis data data primer maupun sekunder di atas penulis berkeyakinan memang benar bahwa faktor popularitas SBY merupakan salah satu unsur faktor penyebab penurunan suara partai kebangkitan bangsa khususnya di DIY.

Ada pertanyaan lanjutan kenapa faktor popularitas SBY ini dapat mengalahkan faktor ketokohan Gus Dur yang saat pemilu 2009 lalu masih ada, sebagai mana yang kita ketahui mayoritas konstituen PKB dari kalangan NU masih mengharapkan dan mengidolakan Gus Dur.

Menurut penulis ada 2 analisis yang dapat di gunakan untuk menjawab pertanyaan itu : *Pertama* PKB yang dapat mengikuti pemilu 2009 adalah kelompok PKB kubu Muhaimin Iskandar yang berseberangan dengan Gus Dur, selain itu dari Gus Dur sendiri malah menganjurkan untuk gol put atau tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu 2009

*kedua* semakin rasionalnya konstituen dan pemilih PKB masa lalu yang mengalihkan dukungannya ke partai lain dengan alasan Gus Dur sebagai tokoh dan ikon PKB telah berseberangan dengan cita cita politik PKB dan NU ini di buktikan dengan analisis konflik yang terjadi selam ini di tubuh PKB, karena harus di akui bahwa konflik yang terjadi di tubuh PKB tidak dapat di lepaskan dari faktor Gus Dur.

## **b. Pragmatisme Perilaku Pemilih Pada Pemilu 2009**

Salah satu fenomena yang menarik untuk diamati dari pelaksanaan pemilu 2009 kemarin adalah apa yang disebut dengan perilaku memilih dari para pemilih. Perilaku memilih adalah keputusan dan tindakan pemilih dalam menentukan pilihannya.

Faktor-faktor penentu perilaku pemilih dalam memutuskan pilihannya ini terbagi pada dua kelompok besar, yakni faktor rasional dan irasional. Kedua faktor ini memiliki garis perbedaan yang tipis dan bersifat subjektif. Karena itu suatu faktor boleh dianggap rasional pada suatu negara akan tetapi ternyata dianggap tidak rasional pada negara yang lain.

Adapun di Indonesia, berdasarkan beberapa kajian yang dilakukan misalnya Afan Gafar (1992), J. Kristiadi (1996), Suryanef & Al-Rafni (2001), dan W.Liddle & Saiful Mujani (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang pemilih menentukan pilihannya dalam pemilu. Sehingga, apabila dibuatkan senarainya, faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor sosial agama, rancangan ekonomi, kepemimpinan partai, pemimpin formal dan nonformal, geografis, tokoh panutan, media massa, pemahaman politik, hubungan patron-client. Secara khusus, dengan mengkaji pemilihan gubernur di Propinsi Sumatera selatan alex noordin (2008)<sup>98</sup> menambahkan bahwa faktor kualitas kandidat, isu-isu kampanye dan ikatan kedaerahan ternyata berpengaruh signifikan terhadap perilaku pemilih dalam

---

<sup>98</sup> Penulis merupakan putra daerah sumatra selatan yang secara langsung atau tidak langsung mengamati faktor kemenangan pasangan alex nordin-eddy yusuf

menentukan pilihannya. Sedangkan faktor media massa, yakni kekerapan pemilih mendapatkan informasi dari media massa; surat kabar, majalah, radio, televisi dan internet tidak berpengaruh secara signifikan.

Apakah sikap dan pilihan politik masyarakat dipengaruhi sogokan ketimbang pertimbangan figur calon? mungkinkah terpilih anggota legislatif maupun eksekutif yang tidak mengandalkan politik uang?

Pertanyaan ini cukup menggelitik, apalagi pada saat Pemilu Legislatif beredar informasi bahwa banyak Caleg melakukan "*serangan fajar*" dengan melakukan praktek money politic.

Dalam banyak literatur demokrasi istilah money politic muncul dari studi – studi tentang perilaku di Amerika Serikat, kemudian digunakan oleh kelompok pemikir politik modern untuk melihat gejala penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih secara berlebihan yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan keadilan (justice).

Pada prakteknya, perilaku seorang pemilih dapat dipaksa atau tunduk melalui ancaman (threat) atau dengan pukulan tongkat (sticks) atau dengan bujukan (induce) dengan pemberian carrots (bayaran). Praktek-praktek seperti ini sering terjadi pada Pemilu sehingga pemimpin yang terpilih berlangsung tidak demokratis. Hal itu menjadi alasan yang mengatakan bahwa money politic akan mencederai demokrasi

Dalam Kamus Wikipedia Indonesia Money politik atau Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia

menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum<sup>99</sup>.

Pada proses ini, tak jarang banyak kontestan Pemilu terjebak kepada perilaku menghalalkan segala cara. Misalnya dengan melakukan praktek politik uang (money politik) itu yang dilarang oleh undang-undang. Pelarangan itu dimuat jelas dalam Pasal 84 Ayat 1 Huruf j UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum<sup>100</sup>. Disana dinyatakan, dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.<sup>101</sup>

Money politic sering diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan calon perwakilan politik dalam pemilihan dengan cara membagi-bagi uang kepada para pemilih dan mempengaruhi pemilih agar memilih calon tersebut. Perbedaannya dengan cost politic adalah biaya yang dikeluarkan para calon, digunakan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pemilih tanpa ada sesuatu pemberian baik dalam bentuk uang atau barang dan tindakan mempengaruhi pemilih untuk

---

<sup>99</sup> <http://hariansib.com/?p=107799> (mungkin kah terpilih bupati karro yang tidak money politik)

<sup>100</sup> Lihat UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

<sup>101</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Politik\\_uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang)

memilih si calon tersebut. Bahasa populernya adalah ongkos yang dikeluarkan calon untuk membiayai tim sukses, alat peraga kampanye dan pengisian saksi di setiap TPS<sup>102</sup>

Kedua istilah itu kemudian semakin berkembang terutama di Negara-negara transisi yang sedang melakukan demokratisasi.

Secara teknis ada perbedaan Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 (Pemilu 2004 berdasarkan nomor urut, Pemilu 2009 berdasarkan suara terbanyak). Mereka yang terpilih menjadi Anggota DPRD periode 2004-2009, bermitra dengan bupati yang belum dipilih langsung oleh rakyat (Bupati dipilih oleh DPRD dengan mengeluarkan ongkos politik yang besar. Akibatnya lahir legislatif dan eksekutif yang lebih mengutamakan pengembalian ongkos politik sedangkan nasib rakyat tidak mengalami perubahan yang berarti.

Pada Pemilu legislatif 2009 dengan sistem suara terbanyak, sikap dan pilihan politik pemilih pada semua lapisan masih menunjukkan kecenderungan yang sama. Pemilih lapisan bawah, cenderung datang ke TPS dengan mobilisasi Caleg yang ingin mengejar suara terbanyak menggunakan uangnya untuk mempengaruhi pemilih dengan pemberian uang, barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pemilih pada lapisan tengah dan atas cenderung memilih kerabatnya walaupun mereka tidak yakin kualitas orang yang dipilihnya.

Praktek politik uang yang langsung kepada masyarakat semakin terdorong dipraktekkan calon legislatif karena adanya persaingan ketat di antara Caleg dari 36

---

<sup>102</sup> <http://hariansib.com/?p=107799> (mungkin kah terpilih bupati karro yang tidak money politik)

Parpol untuk mengisi 55 anggota DPRD I DIY. Dan untuk mengisi jabatan 220 anggota DPRD II dari seluruh kabupaten di DIY.<sup>103</sup>

Kondisi ini disebabkan karena 3 bulan sebelum Pemilu, Mahkamah Konstitusi menetapkan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Persaingan makin meluas antara calon dalam satu partai, sehingga segala cara dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak. Disinilah dugaan munculnya pelanggaran Pemilu yang dilakukan caleg dengan praktek-praktek carrots (bayaran) yang populer dikenal masyarakat dengan istilah "*serangan fajar*".

Dalam kondisi perekonomian yang mengalami kelesuan, harga produk pertanian dan input pertanian tidak seimbang. maka masarakat dari kelas menengah kebawah sangat rentan dengan serangan fajar dari Caleg yang memiliki modal ekonomi. Hasilnya, 55 anggota DPRD I DIY. Dan untuk mengisi jabatan 220 anggota DPRD II mengeluarkan ongkos politik yang tidak wajar besarnya. Akibatnya setelah mereka dilantik akan sulit diharapkan memperjuangkan nasib rakyat yang sudah menjual kedaulatannya.

Masyarakat yang berperilaku pragmatis, walaupun sudah diberikan sosialisasi dan penjelasan yang cukup intent oleh caleg, namun pada saat pencontrengan tetap memberikan suara pada caleg yang meberikan materi ataupun uang lebih padanya. Dan alangkah sedihnya bahkan ada yang menggadaikan nilai suaranya hanya seharga

---

<sup>103</sup> Ket :kab.kota 40 DPRD II kab. Bantul 45 kursi DPRD II Kab.kulon progo 40 kab. Sleman 50 kab g.kidul 45

Rp 5000,- sampai 10.000,- / suara, naif memang, tapi itulah kenyataan yang ada di masyarakat.

Namun di sisi lain sudah banyak juga masyarakat yang “melek” politik, artinya mereka memilih karena melihat program partai atau program si caleg ataupun prospek kinerja si caleg, sehingga walaupun suaranya dibeli oleh caleg tertentu mereka tidak membrikan atau mereka mau terima uang pemberian caleg tapi soal memilih disesuaikan dengan suara hati nuraninya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPW PKB adakah kaitan dan pengaruhnya antara Perilaku pemilih yang sangat pragmatis pada pemilu 2009 semisal masalah money politik terhadap PKB mereka mengatakan <sup>104</sup>

Banyak pengamat yang mengatakan bahwa pkb pada pemilu 2009 kemaren tidak dapat lolos parlementary treshold, dari 10,5% menurun menjadi 4.98%. lima puluh persen lebih penurunanya. ini bukan saja karena pragmatisme konstituen semata, saya tidak mau menyalahkan konstituen PKB, fakta selama ini kalau di ukur terhadap kinerja kita (pengurus dan caleg PKB) hampir tidak melakukan proses-proses agreditasi dengan baik. walaupun toh itu di lakukan masih dilakukan masih sifatnya secara sporadis karena kita di dera oleh konflik yang itu berpengaruh secara besar terhadap citra partai.

Pragmatisme pemilih khususnya konstituen PKB DI DIY saya rasa tidak semuanya walaupun toh ada saya rasa itu sebagian kecil karena ikatan ideologisnya lebih dominan dari pada keterpengaruhan terhadap pragmatisme politik sebagai sumber referensi.

Oleh karena itu kalau kita melihat bahwa pkb masih mendapatkan 4,98% lebih dominan karena faktor ideologis bahwa keterkaitan keberadaan pkb sebagai institusi politik yang di lahirkan oleh NU dan hampir pemilih 85% pemilih pkb adalah warga nahdiyin di tingkat nasional dan khusus di DIY hampir 90% pemilihnya warga NU

---

<sup>104</sup> wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), di lakukan di kantor DPW PKB pada hari kamis 28 oktober 2010



Namun saya juga tidak menolakan kenyataan bahwa banyak juga konstituen PKB pada pemilu 1999 dan 2004 yang juga menjadi pragmatis.

Lantas bagaimanakah pengurus DPW PKB harus menyikapi kondisi masyarakat seperti di atas?

Kita (para caleg yang terpilih dan pengurus partai politik khususnya PKB) harus bekerja keras memberikan pendidikan politik ke masyarakat dengan berbagai cara agar nantinya pada Pemilu 2014 nanti mereka sudah menjadi masyarakat yang cerdas dan memilih caleg sesuai Visi, Misi dan Program si caleg bukan berperilaku pragmatis lagi.

Dengan cara apa pendidikan tersebut disampaikan? Tentunya Para Caleg yang terpilih harus memberikan kinerja terbaiknya pada masyarakat, dan juga tidak melupakan para konstituennya untuk digali suara-suara yang diharapkan masyarakat. Tidak mendekati masyarakat hanya kalau musim Pemilu saja, namun juga menjalin komunikasi yang terus menerus ke bawah.

Akhirnya dengan kinerja anggota legislatif yang bagus dan selalu menjaga komunikasi yang intens dengan konstituen diharapkan masyarakat semakin pandai dan tidak berperilaku pragmatis lagi.

Selain itu kesadaran baru masyarakat akan pentingnya menghindari perilaku money politik dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>105</sup> :

1. Memasyarakatkan slogan dampak money politic bagi pembangunan kepada seluruh elemen masyarakat, karena KPUD dengan sumber dayanya hanya kelelahan dalam aspek teknis.
2. Menggugah kesadaran pengurus partai politik untuk tidak membebani calon dengan ongkos politik di luar kewajiban, meskipun di dalam undang-undang tidak diatur secara jelas besarnya ongkos yang dikeluarkan

---

<sup>105</sup> <http://hariansib.com/?p=107799> (mungkin kah terpilih bupati karro yang tidak money politik)

3. Menggalang partisipasi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk mempengaruhi rakyat agar dasar pemilihan bukan semata uang atau pemberian materi dari calon. Himbauan moral, lebih baik menderita sesaat daripada menderita 5 tahun
4. Membentuk lembaga swadaya melengkapi lembaga Panwas yang bergerak di pedesaan dan perkotaan untuk memantau dan mengkonter calon dan tim sukses yang melakukan praktek money politik.

Gagasan yang dikemukakan di atas hanyalah sebuah idealisme dalam mensikapi fakta dan fenomena yang terjadi di masyarakat belakangan ini. Tentu tidak sepantasnya dibiarkan berkembang sikap pasrah dengan ungkapan beberapa elemen masyarakat.

Ketika Penulis melakukan diskusi dengan teman-teman organisasi ekstrakampus mengenai pemilu<sup>106</sup>. Banyak kawan kawan aktivis yang berpendapat dengan kalimat pesimis “sudah sulit memperbaiki keadaan karena masyarakat “*sudah rusak*”, “*sudah parah*” dan sebagainya. Yang paling penting, ada kesadaran baru bahwa ada yang salah pada masyarakat kita dalam setiap event Pemilu untuk diperbaiki bersama. Kesalahan tersebut, merupakan sebab akibat. Misalnya mengapa pemilih harus dibayar untuk memilih, karena mereka kecewa pada pemimpinnya di

---

<sup>106</sup> Diskusi bersama aktivis HMI Komisariat Tunas Bangsa UMY yang di adakan pasca pemilu 2009 di kantor sekertariat HMI yang beralamat di jln. Kertorejo Karangnongko Gamping Kidul Sleman DIY

legislatif dan eksekutif yang hanya menjalin komunikasi politik pada saat ada kepentingan.

Intinya rakyat kecewa karena kebijakan yang dijabarkan ke dalam perencanaan pembangunan, program pembangunan dan proyek pembangunan belum menaikkan taraf hidup mereka. Dalam kondisi taraf hidup masyarakat yang membaiklah akan lebih mudah ditanamkan budaya malu, sikap kritis. Pragmatismes, bersaksi akan kebenaran, berorientasi pada masa depan. Semua itu, memang dapat dimulai dari seorang pemimpin yang mempunyai integritas dan memperoleh kekuasaan bukan dengan money politic. Mudah-mudahan masih ada keyakinan kita bersama untuk ikut serta terlibat langsung atau tidak langsung untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat dan untuk katakan "TIDAK" pada money politic.

### c. Perubahan Sistem pemilu 2009

Tiga kali pemilu pada era Reformasi "Pemilu 1999, Pemilu 2004," dan Pemilu 2009 terbilang sukses, terlepas dari segala kekurangan dan kecurangan yang terjadi. Lembaga semacam the Carter Center, misalnya, turut memuji pelaksanaan pemilu-pemilu di era Reformasi. Untuk Pemilu 2009<sup>107</sup>, lembaga yang dibangun oleh mantan Presiden AS Jimmy Carter tersebut menulis dalam situs mereka menyatakan,

"The Carter Center congratulates the people, political parties, and National Election Commission (KPU) of Indonesia on the generally peaceful April 9, 2009, legislative elections, the third since the country's democratic transition from the New Order of former President Soeharto.

---

<sup>107</sup> Harun, rafly. *Menimbang sistem campuran Media Indonesia*, 24 Juni 2009

(The Carter Center mengucapkan selamat kepada rakyat Indonesia, partai politik, dan KPU atas terselenggaranya pemilu legislatif 9 April 2009 yang relatif damai, pemilu ketiga sejak transisi demokrasi dari Orde Barunya mantan Presiden Soeharto).

Pujian seperti itu tentu tidak bisa menghilangkan fakta begitu bermasalahnya pemilu-pemilu di era Refomasi. Banyaknya parpol yang bertanding, penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang membingungkan pemilih, penghitungan suara yang lambat dan penuh kecurangan hingga menghadirkan ratusan kasus di Mahkamah Konstitusi (MK).

Terlalu tersentralisasinya pelaksanaan pemilu di tangan KPU hingga membuat lembaga itu kalang-kabut sendiri, kualitas calon terpilih yang meragukan, adalah sebagian soal yang segera membutuhkan jawaban<sup>108</sup>.

Perdebatan tentang sistem pemilu sering bergerak dalam kutub ekstrem. Mereka yang menilai sistem proporsional bermasalah segera tertarik dengan sistem mayoritarian (pluralitas-mayoritas), atau yang secara salah kaprah disebut dengan sistem distrik. Demikian pula sebaliknya. Padahal, baik sistem proporsional maupun sistem distrik tidak sepenuhnya baik dan memang tidak ada sistem pemilu yang sempurna. Setiap sistem pemilu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pilihan bergantung pada kebutuhan di mana sistem itu diterapkan.

Di Indonesia, kebutuhan paling nyata adalah menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel di satu sisi dan penguatan sistem kepartaian di sisi lain, yang pada

---

<sup>108</sup> Ibid,

gilirannya berujung pada penguatan sistem pemerintahan presidensial. Sistem distrik kerap dianggap lebih berdaya untuk menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel, tetapi lemah dalam penguatan sistem kepartaian karena peranan partai menjadi lebih minim. Sistem proporsional dinilai sebaliknya, partai terlalu dominan dan calon kurang mendapatkan insentif untuk berdekatan dengan konstituèn. Bagi mereka, berada di lingkaran elite partai jauh lebih strategis dan menentukan.

Untuk mengompromikan keduanya, Indonesia menerapkan sistem proporsional dengan daftar terbuka sejak Pemilu 2004. Dari segi pelaksanaan, sistem ini ternyata sangat rumit, memunculkan banyak ketidakpastian karena proses atau rantai penghitungan suara yang terlalu panjang dan lama, plus biaya pemilu yang sangat mahal. Dari sisi hasil, ditambah dengan penerapan suara terbanyak, sistem ini hanya menghasilkan calon populer tanpa kejelasan kapasitas dan track record.

Terlebih lagi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU No 10 Tahun 2008 tentang pemilu. Dengan demikian penetapan caleg untuk pemilu 2009 akan ditentukan dengan sistem suara terbanyak.

Dengan demikian caleg tidak lagi ditentukan oleh nomor urut, tapi suara terbanyak. Maka hal ini menyebabkan terjadi pro kontra di kalangan calon legislatif termasuk calon legislatif dari PKB yang waktu lalu menggunakan sistem nomor urut.

Lantas apakah ada pengaruhnya Perubahan Sistem pemilu 2009 (berkaitan dengan UU pemilu No 10 tahun 2008 dan keputusan MK tentang pemberlakuan sistem suara terbanyak) terhadap PKB

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPW PKB adakah kaitan dan pengaruhnya antara perubahan Sistem pemilu 2009 (berkaitan dengan UU pemilu No 10 tahun 2008 dan keputusan MK tentang pemberlakuan sistem suara terbanyak) terhadap PKB<sup>109</sup> mereka mengatakan

Saya kira itu secara psikis berpengaruh, Karena bagaimanapun juga PKB sejak semula membuat keputusan dengan sistem nomer urut. Lalu Dengan adanya keputusan MK ditengah jalan menjadi sistem suara terbanyak. Ini otomatis tingkat konsolidasinya tidak semasih ketika sebagai representasi partai.

Hal ini sangat beragam. Di satu sisi menguntungkan kalau itu semua bergantung calegnya. kalau sistem suara terbanyak dan semua calegnya mau berkompetisi dengan sehat maka hal ini akan sangat menguntungkan bagi partai tetapi juga terjadi sebaliknya di daerah tertentu misalnya karena calegnya saling menunggu partai tidak cukup untuk melakukan pressosies untuk melakukan penekanan atau instruksi secara tegas terkait untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang caleg. Jadi hal ini tidak selalu menguntungkan maupun merugikan dengan perubahan yang semula nomer urut menjadi suara terbanyak di satu sisi menguntungkan jikalau calegnya kemudian mau berkompetisi secara sehat maka hal itu akan sangat menguntungkan.

Bagi PKB sendiri hal itu di sikapi biasa biasa saja karena pkb mengikuti sistem yang berlaku. Karena partai politik itu sebagai pilar demokrasi. Demokrasi itu kan musti harus ada rule of law semua aturan yang menjadi keputusan maka harus mengikuti atau mengikuti semua peraturan yang berlaku. persoalannya apakah dengan tidak adanya

---

<sup>109</sup> wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), di lakukan di kantor DPW PKB pada hari kamis 28 oktober 2010


keputusan MK maka PKB akan lebih besar ataupun dengan diberlakukannya keputusan MK tentang suara terbanyak menyebabkan PKB Lebih turun lagi itukan juga belum tentu, semuanya itu bergantung kembali pada calegnya. karena waktu 9 bulan untuk kampanye, itu otomatis untuk melakukan kampanye di masarakat itu dirasa sudah cukup. Berkaitan dengan masalah perubahan dari proses mencoblos menjadi mencontreng pada saat pemilu, apakah itu juga mempengaruhi penurunan perolehan suara pkb?

Secara jujur kami katakan bahwa PKB belum pernah melakukan penelitian, namun secara pribadi saya berpendapat Kalau toh ada merugikan itu saya kira iya. Jujur saya katakan mayoritas konstituen PKB ada di daerah pedesaan sehingga pendidikan terbatas sehingga kesiapan mental dengan sistem yang baru itu akan menjadi beban mental tersendiri bagi konstituen ketika masuk di bilik.kalu toh ada itu pun kecil pengaruhnya bagi pkb. Karena apa kembali lagi pada kinerja partai politik dan kinerja para caleg dalam melakukan sosialisasi akan sangat menentukan. Karena waktu 9 bulan yang telah di berikan untuk proses sosialisasi bagai mana cara mencontreng yang baik dan benar sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku saya rasa itu waktu yang sudah cukup panjang.

Kalau pertanyaanya adalah apakah itu merugikan bagi PKB, saya rasa IYA sedikit banyak itu merugikan namun prosentasenya kecil, Namun karena konstituen kita banyak yang kelas menengah ke bawah dan banyak yang berada di pedesaan, faktai ini kita akui, Sebagai contoh di daerah kulon progo dan sleman yang pada pemilu 2004 kita mendapatkan suara besar. tetapi kembali lagi pada kinerja partai politik dan kinerja caleg sejauh mana melakukan kampanye dan sosialisasi cara penyontrengan yang benar.

Secara sederhana sistem pemilu 2009 ini memiliki pengaruh bagi penurunan suara PKB karena sistem ini kan di berlakukan di tengah jalan dan PKB sudah sejak awal mempersiapkan sistem nomer urut. Tentunya hal ini

mengurangi semangat awal ketika ada perubahan. Sistem yang baru ini memiliki kelemahan bagi PKB

1. Untuk bekerja menjadi caleg tingkat provinsi, sosialisasi se kabupaten bantu misalnya masih di rasa tidak cukup, itu harus membuat sebuah tim yang solid dan masive, kalau itu hanya di lakukan oleh seorang pribadi caleg itu tidak cukup
2. Sistem yang baru ini secara psikologis akan menjadi beban bagi masarakat yang kurang educated piple atau masakat yang kurang terdidik
3. Secara teknis sistem yang baru ini sedikit banyak akan mengurangi maksud dan tujuan seorang pemilih, banyak suara yang berbeda maksud dan tujuanya misal masalah suara sah itu dimana dalam tanda tontreng {  }apakah di ujung pangkal atau tengahnya.bahkan di beberapa TPS kesalahan menconteng yang terlalu panjang menyebabkan ketidak absahan suara atau gugur. atau bahkan bagi orang orang yang jarang memegang bolpoin hal ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi konstituen di bilik suara, secara kualitatif tentunya hal ini juga menjadi kerugian bagi PKB.
4. Memunculkan persaingan tidak sehat antar caleg dengan cara money politik, maraknya praktik money politics ini di angap menjadi penyebab turunnya suara PKB di DIY, Di masyarakat bawah, praktik



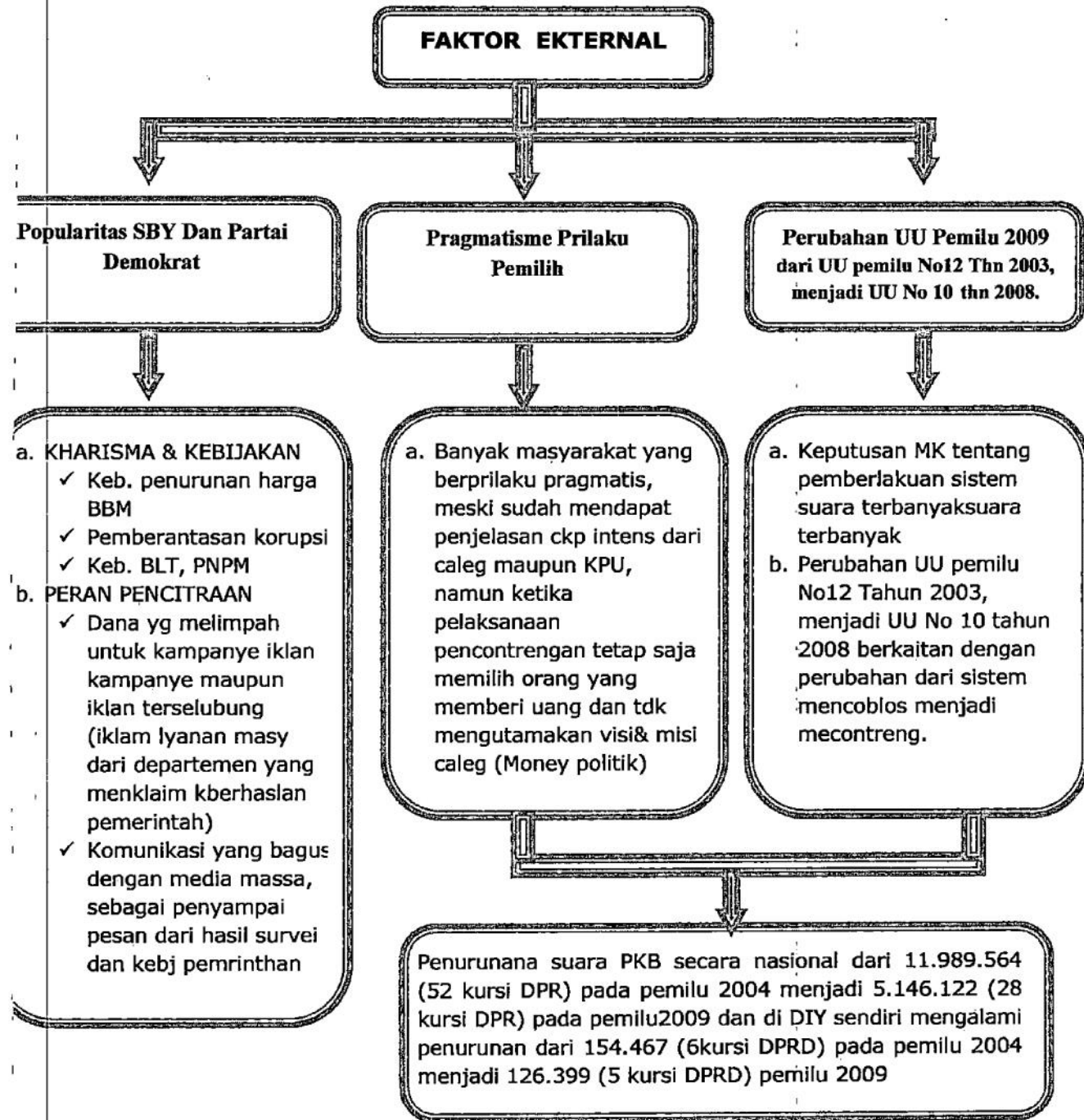
money politics itu dilakukan dengan sangat gencar. "Praktik money politics sangat gencar dilakukan sejumlah pihak, Karena itu, perolehan suara PKB pada pemilu 2009 ini mengalami penurunan. Mengingat sumber daya partai ini tidak mampu untuk mengantisipasinya.

Dari ke tiga faktor eksternal di atas, secara pribadi penulis harus jujur tidak mengetahui berapa persen suara PKB yang hilang akibat faktor eksternal ini: (a) faktor popularitas SBY dan demokrat. (b) pragmatisme perilaku pemilih pada pemilu 2009 berkaitan dengan sikap pemilih yang mudah money politik dan (c) perubahan sistem pemilu 2009 berkaitan perubahan UU sistem pemilu no 12 tahun 2003 menjadi UU no 10 tahun 2008 yang merubah tata cara memilih dari mencoblos menjadi mencontreng dan keputusan MK tentang pemberlakuan sistem suara terbanyak. namun faktanya perolehan suara PKB DI DIY mengalami penurunan cukup signifikan ketika pemilu 2009 (154.467) dibandingkan pemilu 2004(126.399).

Berikut ini adalah bagan yang dapat mempermudah penjelasan masalah faktor eksternal di atas sebagai faktor penurunan suara PKB pada pemilu 2009 di DIY

Bagan 3.1

Faktor external Penyebab Penurunan Suara PKB Dalam Pemilu 2009 di DIY



## **2. Faktor Internal**

Faktor internal sebagai penyebab penurunan suara PKB ini adalah faktor-faktor yang terjadi dari dalam partai PKB sendiri sebagai pemicunya, faktor itu dapat di lihat dari perilaku elite politik PKB, sebagai contoh adalah konflik elite yang terjadi di internal DPP PKB yang juga berpengaruh terhadap elite-elite PKB di daerah, efek dari konflik ini memunculkan partai PKNU yang di dukung oleh banyak sekali kyai khas NU. selain itu konflik internal PKB juga menyebabkan agenda dan konsolidasi kemenangan pemilu di daerah menjadi terganggu karena pengurus PKB lebih di sibukan oleh urusan konflik internal.

### **a. Konflik Internal PKB**

Jauh-jauh hari banyak pengamat dan politisi yang mengatakan Konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan berimbas pada menurunnya perolehan suara dalam Pemilu 2009. Pemilih PKB diyakini akan memindahkan dukungannya ke partai lain, mulai dari partai yang berbasis Nahdhotul ulama, islam dan nasionalis. Ternyata benar prediksi dari beberapa pengamat politik tersebut, melihat dari hasil pemilihan umum tahun 2009 memang suara PKB merosot sangat tajam yaitu berkurang hampir 6.843.332 suara dari pemilu tahun 2004 atau hampir 50% secara nasional.

## 1) Konflik Di Tubuh DPP PKB

Dalam pembahasan sub-bab menguraikan situasi yang terjadi dalam konflik PKB. konflik yang terjadi di partai ini susah untuk diselesaikan. meskipun sudah banyak sekali kalangan yang berusaha memediasi baik dari kalangan internal PKB dan NU maupun dari pihak luar, Salah satu penyebabnya, adalah kekuasaan Ketua Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terlalu kuat. Kultur yang terbangun dari awal dan di aminni oleh AD/ART PKB sudah menempatkan Gus Dur sebagai tokoh sentral yang memengaruhi seluruh kebijakan. Mungkin inilah faktor personal dari Gus Dur yaitu personalisasi kekuasaannya semakin kuat di kubu PKB tersebut. Sehingga berimbas pada pemecatan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB itu, hal ini berdampak lebih buruk dibandingkan saat Gus Dur memecat Matori Abdul Djilil<sup>110</sup>. Alasannya, banyak dari para pendukung PKB ketika itu yang memahami pemecatan terhadap Matori sebagai langkah yang tepat. Menurut Gus Dur hal ini terjadi karena, Matori dianggap membangkang terhadap dirinya yang saat itu masih menjadi ke Dewan Syuro PKB sementara pemecatan terhadap Muhaimin

---

<sup>110</sup> Catatan penulis: Matori Abdul Jalil di pecat dari ketua DPP PKB karena menghadiri sidang paripurna DPR/MPR Yang membahas pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI saat itu, meskipun sudah ada keputusan dari DPP PKB bahwa semua anggota Fraksi PKB menyatakan walk out dari sidang istimewa II MPR RI. Padahal saat itu Matori Abdul Jalil duduk sebagai ketua umum DPP PKB dan wakil ketua umum MPR RI tidak ikut serta melakukan walk out, bahkan Matori Abdul jalil juga menghadiri pelantikan Megawati-Hamzah Haz sebagai presiden dan wapres RI. Tidak cukup sampai di situ Matori bahkan menerima jabatan menteri pertahanan dan keamanan yang di tawarkan oleh megawati dalam kabinet gotong royong.

lihat juga dalam Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasinal dan partai modern*, MALANG ,Averroes press, , 2005 halm 60-64

iskandar di rasa kurang tepat dan hanya karena pengaruh dari orang-orang yang selama ini ada di sekitar Gus Dur<sup>111</sup>.

DPP PKB juga didera konflik politik internal, dan konflik yang terjadi ini berlangsung cukup menguras energi karena waktu yang dibutuhkan panjang bahkan sampai persidangan pengadilan. Konflik yang pertama adalah antara DPP PKB Gus Dur – dengan mantan ketua Dewan Tanfidziyah Matori Abdul Jalil. Matori sebagai ketua dianggap bermuka dua oleh komunitas partai, karena menelakung keputusan partai secara organisasi, dan dianggap lebih dekat dan berkomitmen pada penguasa saat itu dari pada partai. Konflik semakin tajam terjadi sehingga berujung pada pemecatan Matori dari ketua Tanfidziyah bahkan dari keanggotaan partai. Hal ini terus berlangsung karena Matori tidak menerima keputusan ini<sup>112</sup>.

Peristiwa itu kalau dirunut memang akan semakin memberikan gambaran tentang akar masalah dari konflik ini. Sosok Matori yang “terbuang” pasca Mukhtamar PPP dirangkul oleh Gus Dur dan sampai pada puncaknya mendapatkan posisi yang luar biasa yaitu dipercaya oleh Dewan Syuro PKB untuk duduk sebagai Ketua Dewan

---

<sup>111</sup> <http://www.antarane.ws.com/view/?i=1207405289&c=NAS&s=> (5 april 2008)

Tim penyelamatan partai DPP PKB yang dibentuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengumpulkan berbagai fakta terkait latar belakang kisruh di internal PKB. Tim Penyelamatan Partai DPP PKB dalam hasil investigasinya menemukan adanya 10 nama aktor di sekitar Gus Dur yang diduga berperan dalam memicu konflik internal di partai itu. Mereka adalah : adalah Sigit Haryo Wibisono (anggota Dewan Syuro), Zanuba Arifa Chafsoh (Sekjen), Artalyta Suryani (Bendahara Umum), Moeslim Abdurrahman (Pjs Ketua DPW DKI), Aris Junaidi (Wakil bendahara), Hermawi F Taslim (Ketua) dan Ikhsan Abdullah (Wasekjen). Hasan Aminuddin (Ketua DPW PKB Jatim), Ipong Muhlisoni (Ketua DPW Kaltim) serta Fathurrahman (Ketua DPW PKB Bangka Belitung).

<sup>112</sup> Nahrawi, imam, *moralitas politik PKB, Aktualisasi PKB sebagai partai kerja, partai nasional dan partai modern*, MALANG, Averroes press, , 2005 halm 60-64

Tanfidziyah. Posisi ini sampai menghantarkan Matori untuk menduduki jabatan sebagai salah satu dari Wakil Ketua MPR.

Seiring dengan posisi Gus Dur yang sudah tidak lagi menjadi presiden, maka konfigurasi politik juga mengalami perubahan, hal ini mungkin yang mendorong Matori juga berubah komitmennya pada partai, apalagi pada Gus Dur. Matori berjalan sendiri tanpa kendali partai merapat pada pemerintahan Megawati dan berhasil mendapatkan jabatan sebagai Menhankam. Meskipun telah banyak diingatkan bahkan akhirnya sampai dipecat dari ketua PKB namun Matori jalan terus, bahkan ia menggugat balik keputusan PKB yang memecatna, sampai pada persidangan di pengadilan.

Konflik besar lain di tubuh DPP PKB adalah lahirnya kelompok yang tidak menerima hasil Muktamar II PKB dalam kelompok ini berhimpun antara lain Alwi Shihab, Saifullah Yusuf, A.S Hikam, Khofifah I.P, Khoirul Anam dan lain-lain. Di samping itu kelompok ini juga didukung oleh beberapa Kiai besar NU yang selama ini menjadi pilar PKB<sup>113</sup>. Banyak persoalan yang dijadikan pemicu dari konflik ini antara lain masalah pemecatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari pengurus DPP karena menjadi Menteri, sampai yang terakhir adalah hasil Muktamar II PKB yang dianggap cacat hukum, dan sebagainya.

---

<sup>113</sup> Keterangan : kelompok inilah yang nantinya menjadi embrio pendirian paratai kebangkitan nasional ulama (PKNU)

Beberapa pokok masalah yang menjadi bahan diskusi yang menarik seputar Muktamar II PKB antara lain: apakah Alwi Shihab telah melanggar AD/ ART partai? bisakah Alwi Shihab diberhentikan oleh rapat pleno DPP padahal beliau adalah mandataris MLB Yogyakarta? jawaban dari beberapa pertanyaan diatas sebenarnya semuanya sudah jelas dan gamblang karena telah diatur secara eksplisit dalam AD/ ART partai (Kronologi Muktamar II PKB; 2005).

Kalau kita lihat AD/ ART pasal 3 jo pasal 4 peraturan partai NO. 0534/ DPP-02/III/A.I/I/2002 maka Alwi Shihab telah melanggar keputusan partai sebagaimana pasal 22 ayat (2) ART PKB, yaitu tentang perangkapan jabatan. Selain itu karena keputusan partai yang dilanggar adalah keputusan yang dihasilkan oleh rapat pleno maka Alwi bisa diberhentikan, hal ini dijelaskan pula dalam pasal 79 ayat (1) butir a jo pasal 22 ayat (2) ART PKB bahwa rapat pleno adalah jenis rapat partai yang dapat melakukan pemberhentian personalia Dewan Pengurus Partai. Di sini juga dijelaskan tidak ada pengecualian apakah yang bisa diberhentikan adalah mandataris atau non mandataris<sup>114</sup>.

Konflik ini cukup serius manakala masing-masing pihak saling bersikukuh bahwa merekalah yang benar, dan komunikasi politik antara kedua belah pihak semakin sulit untuk ditingkatkan sehingga ada solusi. Persoalan ini juga sampai masuk pada persidangan pengadilan. Memang cukup rumit untuk menjelaskan fenomena konflik partai yang demikian.

---

<sup>114</sup> Ibid., Hal 62

Konflik di PKB ini juga bagikan bola liar yang mampu ditendang, digocek dan ditendang kemanapun. Atas nama aturan partai, atas ketidak absahan keputusan dan atasnama-atasnama yang lain menjadikan para tulang punggung DPP PKB harus bersebrangan dengan sesama teman DPP PKB hasil Muktamar II. Kedekatan, persahabatan, kepatuhan dan lain sebagainya bisa berubah dan berbalik arah oleh sebuah kepentingan-kepentingan kelompok.

Ternyata perjalanan konflik di tubuh partai PKB tidak hanya sampai pada konflik PKB hasil Muktamar II yang menjadikan muhaimin sebagai ketua dewan tahfidz dan Gus Dur sebagai ketua dewan syuro. Konflik dalam tubuh PKB ini merupakan konflik elit yang pada dasarnya keduanya memiliki hubungan keluarga; paman dengan keponakan; Struktur tertinggi PKB berada di Dewan Syuro sementara Dewan Tanfidz berfungsi sebagai eksekutif. Namun, pengambilan kebijakan yang sah harus ada keputusan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz.<sup>115</sup>

Konflik antara keduanya berawal saat Gus dur dengan mengatasnamakan Dewan Syuro melakukan pemberhentian terhadap Ketua Dewan Tanfidz Muḥaimin Iskandar.

Alasan pemberhentian itu sendiri pada dasarnya masih *bias*. karena adanya pelanggaran normatif Ketua Dewan tanfidz terhadap peraturan atau AD/ART Partai atau karena adanya tendensi politis. Sebelumnya, memang beredar kabar bahwa

---

<sup>115</sup> <http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/15/20545640/gus.dur.sebut.sby-jk.biang.runyam.pkb>



mandataris Muktamar II PKB Semarang yang akan berakhir hingga 2010, masak Muhaimin yang dipilih 400 pengurus DPC PKB se-Indonesia itu harus mundur dengan keputusan 20-an orang.<sup>121</sup>

Dikotomisasi PKB antara Gusdur dan Muhaimin terus menjadi bola salju dan menjadi fenomena politik yang menjadi sorotan publik. Masing-masing kubu mengklaim bahwa 'PKB'-nya lah yang sah. Konflik semakin tajam saat masing-masing kubu menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) dalam tenggat waktu yang hampir bersamaan. Kubu Gusdur menggelar MLB di Pondok Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat. Sementara kubu Muhaimin mengadakan MLB di bilangan Ancol, tepatnya di Hotel Mercure.

Masing-masing pelaksanaan MLB, baik MLB PKB 'Parung' maupun MLB PKB 'Ancol', memiliki agenda yang saling mendeligitimasi kubu lawan. MLB PKB 'Parung' menghasilkan keputusan pengangkatan Ali Masykur sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz 2008-2010. Sementara MLB 'Ancol' pun memiliki agenda pengangkatan Ketua Umum Dewan Syuro baru, yang juga merupakan bentuk deligitimasi atas posisi Gusdur<sup>122</sup>. Berikut kronologi konflik PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin Iskandar

---

<sup>121</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2008/4/5/deklarator-pkb-minta-gus-dur-muhaimin-islam/>

<sup>122</sup> <http://catatan-orang-biasa.blogspot.com/2008/12/konflik-pkb-ancol-vs-pkb-parung.html>

TABEL 3.1

Berikut kronologi konflik PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin Iskandar<sup>123</sup>

NO	TANGAL	KEJADIAN
1	26 Maret 2008	Acara pelepasan Ketua Bappilu PKB, Mahfud MD sebagai hakim konstitusi berlanjut menjadi rapat rutin gabungan Ketua DPP PKB yang membahas munculnya isu pihak-pihak yang ingin menggelar Muktamar Luar Biasa. Isu itu dinilai untuk menggoyang Gus Dur dari Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Rapat internal itu akhirnya berujung pada dicopotnya Muhaimin Iskandar dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB. Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar MLB, 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain. Dalam pemungutan suara itu, Gus Dur, Muhaimin dan Machfud MD tidak mendapat hak suara.
2	14 April 2008:	PKB Muhaimin secara resmi mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan. Muhaimin menggugat Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur atas pemecatan dirinya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB. Sementara Sekjen PKB Muhaimin, Lukman Edy, menggugat Gus Dur karena tidak terima pemecatan dirinya dari Sekjen PKB dengan alasan rangkap jabatan.
3	30 April-1 Mei 2008:	PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor. MLB ini menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB. Ali Masykur Musa menggantikan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan Yenny Wahid tetap sebagai Sekjen.
4	2-4 Mei 2008	Giliran PKB Muhaimin yang menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol. MLB yang lebih mewah dari MLB Parung ini menghasilkan keputusan Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB. Sementara KH Aziz Mansyur diplot sebagai Ketua Dewan Syuro, dan Lukman Edy sebagai Sekjen
5	11 Mei 2008:	PKB Muhaimin menyerahkan berkas pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (11/5) siang.
6	15 Mei 2008	Sidang perdana sengketa PKB digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, tidak ada pengurus internal PKB yang hadir. Baik dari PKB versi Muktamar Luar Biasa (MLB) Parung pimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ali Masykur Musa selaku pihak tergugat

7	29 Mei 2008	PKB Muhaimin meresmikan kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB di Kawasan Menteng, Jakarta. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno diplot sebagai Ketua LPP PKB Muhaimin
8	30 Mei 2008:	PKB Parung dengan dipimpin Ketua Umum, Ali Masykur Musa, melaporkan Lukman Edy ke Mabes Polri atas tuduhan tindak pidana melakukan pemalsuan dalam jabatan yang telah diberhentikan berupa pemakaian lambang partai atau atribut PKB dengan tujuan untuk mengakui bahwa masih menjabat sebagai Sekjen DPP PKB.
9	18 Juni 2008	PKB kubu Muhaimin Iskandar membuka pendaftaran caleg yang dimulai 18 Juni-1 Juli 2008 di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP), Jakarta.
10	9 Juli 2008	Muhaimin Iskandar dan Yenny Wahid menjadi 'perhatian utama' saat acara pengambilan nomor urut parpol peserta Pemilu 2009 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Keduanya berebut kertas nomor urut. Meski kemudian mengangkatnya bersama-sama. PKB mendapat nomor urut 13 pada Pemilu 2009
11	11 Juli 2008:	PKB Parung menggelar acara pendaftaran caleg PKB di kantor DPP PKB Kalibata, Jakarta. Dalam acara itu, Ketua Umum PKB versi Muktamar Parung, Ali Masykur Musa, memutuskan pensiun sebagai 'artis' Senayan. Ali Masykur yang sudah dua periode menjabat anggota DPR, memutuskan mundur dan tidak mencalonkan lagi sebagai calon anggota legislatif (caleg) periode 2009-2014.
12	15 Juli 2008	Konflik PKB ikut memanans dengan ditetapkannya anggota DPR dai Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Yusuf Emir Faishal sebagai tersangka kasus dugaan suap alih fungsi hutan mangrove di Musi Banyuasin, Sumsel. Yenny menyebut Muhaimin dan oraang-orang dekatnya ikut kecipratan duit dari Yusuf Faishal.
13	16 Juli 2008	PKB Muhaimin lewat kuasa hukumnya mengultimatum 3 X 24 jam bagi Yenny untuk mengklarifikasi pernyataannya. Jika tidak, Yenny akan dilaporkan ke polisi.
14	18 Jul 9008:	Kasasi PKB Gus Dur di Mahkamah Agung terkait konflik PKB ditolak. Dalam putusan kasasi bernomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 itu, MA memutuskan struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005. Gus Dur tetap sebagai Ketua Umum Dewan Syura, dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

**Sumber : di olah dari :** Kronologi konflik yang di susun oleh wartawan Persda Network Hado Santoso dalam Jalan Panjang Konflik PKB « ~ALIANSI MASYARAKAT PEMILIH INDONESIA~ Indonesia Voters Alliance. Dalam <http://ampi.wordpress.com/2008/07/20/jalan-panjang-konflik-pkb/>

Serangkaian kronologi konflik ini dapat di katakan sebagai konflik yang tak berujung dan merugikan partai ini sendiri, bagai mana tidak, efek dari konflik ini adalah menurunnya suara PKB pada pemilu 2009.

ketika partai lain sibuk berkonsolidasi guna pemenangan pemilu yang di lakukan mulai DPP hingga ke daerah namun partai ini malah lebih di sibukan dengan konflik yang tak berujung hingga pemilu 2009 di mulai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris DPW PKB adakah kaitan dan pengaruhnya pengaruhnya konflik internal partai dalam penurunan suara partai kebangkitan bangsa <sup>124</sup> mereka mengatakan

Persoalan penuruna suara PKB pada pemilu 2009, konflik internal belum usai, itu menyebabkan citra partai di mata publik dan masyarakat khususnya konstituen PKB menurun sehingga itu otomatis berimbas pada penurunan suara pkb.kalaupun konflik PKB membuat PKB populer namun kepopuleran pkb itu karena konfliknya. Jujur saya katakan kepopuleran PKB bukan dalam membuat kebijakan atau keberpihakan terhadap masarakat scara kebutuhan. konflik internal partai merupakan pukulan terberat, sehingga membuat kejatuhan pamor PKB di tingkat konstituen. Kehilangan pamor, tak hanya terjadi di DIY saja. Namun, hampir terjadi di seluruh DPW PKB se-Indoensia. khusus di DIY penurunan ini saya kira impek atau imbas dari konflik DPP PKB pusat

Sedangkan konflik yang terjadi di DPW PKB DIY sendiri sebenarnya terjadi sejak pasca muktamr PKB ke 2 yang di adakan di semarang, dimana muktamar ini melahirkan begitu banyak konflik antar pengurus yang ada di DPP PKB dan DPW PKB DIY yang masih setia mendukung Gus Dur Dan Muhaimin Sebagai ketua

---

<sup>124</sup> wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), di lakukan di kantor DPW PKB pada hari kamis 28 oktober 2010

dewan Syuro dan dewan Tahfidz, namun juga banyak di antara tokoh tokoh DPP PKB dan DPW PKB DIY yang tetap loyal kepada alwi syihab dan saifullah yusuf sebagai ketua dan sekretaris dewan Tahfidz DPP PKB.

## 2) Konflik di DPW PKB DIY<sup>125</sup>

Konflik yang terjadi di DPW PKB DIY di mulai pada tahun 2004 menjelang pemilu legislatif 2004 ketua dewan tahfidz DPW PKB **KH. Muhjab Mahali** meninggal dunia dan Sesuai hasil rapat pengurus DPW PKB maka jabatan ketua dewan tahfidznya di serahkan kepada **Hj. Ida Fatimah ZA** sebagai pejabat sementara (PJS). Namun hal ini tidak berjalan sinkron dengan kemauan DPP PKB. karena PJS tidak mematuhi keputusan yang telah di buat DPP. Salah satu keputusan yang tidak dipatuhi adalah soal daftar calon legislatif. Ida Fatimah sebagai Pejabat sementara Ketua DPW mengeluarkan daftar calon legislatif untuk DPRD DIY. Namun bersamaan dengan itu, DPP juga mengeluarkan daftar lain. Selanjutnya, DPW DIY mengabaikan daftar yang dikeluarkan DPP serta tetap menggunakan daftar yang dibuat sendiri. "Itu menunjukkan terjadi ketidaksinkronan antara DPP dan DPW. Selain juga tentu ada masalah lain. Hal itulah yang menjadi alasan DPP untuk membekukan DPW PKB DIY. maka kepengurusan DPW PKB DIY secara resmi dibekukan oleh DPP melalui surat DPP No 01663/DPP 02/III/A.I/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 Selain surat pembekuan, DPP mengeluarkan Surat Keputusan No

---

<sup>125</sup> Penulis dalam usaha untuk mendapatkan data tentang konflik DPW PKB DIY dengan cara melakukan diskusi dan wawancara dengan berbagai pihak non struktural yang sedikit banyak mengetahui peta konflik DPW PKB DIY dan dengan menganalisa dokumen dokumen PKB Baik dari internet maupun yang penulis dapatkan dari kantor DPW PKB

01713/DPP-02/III/A.I/IX/ 2004 tertanggal 16 September 2004 tentang Pembentukan Tim Resolusi yang langsung ditandatangani Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid dan Sekretaris Arifin Junaidi serta ketua umum PKB Alwi Shihab dan Sekjen Muhaimin Iskandar.<sup>126</sup>

Tim Resolusi ini diketuai **Dr. H. Lalu Misbah Hidayat** dan sekertarisnya adalah **Suharno PA. SH.** Tim ini bertugas menggelar Muswil secepatnya untuk membentuk kepengurusan yang baru. pembekuan kepada pengurus DPW PKB DIY dilakukan karena setelah meninggalnya Ketua Dewan Tanfidz PKB DIY, KH Mujab Mahali, terjadi ketidaksinkronan antara DPW dan DPP. tim resolusi ini juga menyatakan “Meski dinilai melanggar dalam soal daftar caleg, Anggota legislatif DIY dari PKB tetap akan menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dan pembekuan tidak akan berpengaruh pada anggota DPRD<sup>127</sup>, atas pembekuan ini, roda partai sementara akan digerakan oleh tim resolusi. Dan agenda yang paling mendesak adalah dengan segera menggelar Muswil untuk membentuk kepengurusan yang baru. “Paling lambat satu tahun setelelah pembekuan sudah harus digelar musawarah wilayah (Muswil)

Pada bulan oktober tahun 2004 di adakan muswil di DPW PKB yang agendanya adalah memilih ketua dewan tahfidz dan pengurus yang baru sesuai hasil

---

<sup>126</sup> Lihat hal lampiran : surat keputusan no. No 01713/DPP-02/III/A.I/IX/ 2004 Tentang Tim resolusi DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>127</sup> Lihat juga DPW PKB DIY DI BEKUKAN dalam <http://www.mail-archive.com/kmnu2000@yahoogroups.com/msg01193.html> lihat juga dalam <http://jogjanews.blogspot.com/2004/09/pengurus-dpw-pkb-dibekukan.html>

kinerja Tim resolusi yang bertugas untuk melaksanakan Muswil dan memilih pengurus yang baru. Pada muswil tahun 2004 ini yang menjadi pemenang ketua dewan tahfidz dalam pemilihan adalah **H. Sukamto, SH.** namun hasil Muswil itu tidak diakui oleh DPP. Sebab, menurut Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurahman Wahid, Soekamto yang juga Ketua DPC PKB Sleman itu diketahui membagi-bagikan telepon seluler untuk memuluskan jalannya terpilih sebagai Ketua DPW DIY. Soekamto sendiri tidak keberatan terhadap sikap DPP itu<sup>128</sup>. Setelah keputusan yang di keluarkan oleh DPP Yang tidak mengakui kemenangan sukamto maka DPP memenangkan pemenang ke dua hasil muswil DPW PKB DIY yaitu **H. Agus wiyarto SE** sebagai ketua dewan tahfidz DPW PKB DIY 2005-2010<sup>129</sup>.

Selesai di adakan muswil tampaknya konflik di tubuh DPW PKB DIY tidak selesai, Setelah hasil Muswilnya tidak diterima oleh DPP, saat itu sempat muncul desakan untuk diadakannya Musyawarah Luar Biasa (Muswilub). Permintaan itu dimunculkan kader partai di tingkat bawah (DPAC/Dewan Pimpinan Anak Cabang) DIY yang meminta DPP mengizinkan diadakannya Muswilub agar kemelut yang terjadi tidak berkepanjangan, hal ini di lakukan karena saat itu kondisinya bahkan mengarah pada adanya upaya politisasi penyimpangan dari kenyataan sehingga jika tidak segera disikapi, dikhawatirkan situasi menjadi lebih buruk. Hal itu bisa menimbulkan salah paham dan akhirnya akan mengarah pada adu domba antara

<sup>128</sup> lihat dalam: <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/17/ked11.htm>

<sup>129</sup> Lihat daftar pengurus dpw pkb 2004 -2009 nomer surat 01809/DPP-02/III/A.I/2005 dalam hal lampiran



tokoh panutan partai dan tokoh panutan dalam masyarakat, Namun permintaan itu tidak di terima oleh DPP dan tetap kokoh pada pendiriannya,

Setelah hasil Muswilnya tidak diterima oleh DPP, di internal pengurus DPW PKB juga masih banyak terjadi konflik, hal ini dapat di lihat dari banyaknya pengurus yang menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan DPW PKB 2004-2009 alasannya cukup beragam mulai masalah muswil yang tidak di terima hingga masalah konflik pasca muktamar II di semarang 2005. Para pengurus yang mengundurkan diri itu di antaranya adalah ketua dewan syuro DPW PKB KH.muhamad fadlan Dan beberap pengurus yang lain.tercatat kepengurusan 2004-2009 ini hanya berlangsung 33 hari

Menyikapi hal itu maka DPP mengeluarkan keputusan no.01845/DPP-02/III/A.I/II/2005 Yang mengangkat pengurus DPW PKB DIY 2005-2010 yang baru tertanggal 8 february 2005<sup>130</sup>.

Pasca di adakanya muktamar II semarang 2005 yang menyebabkan konflik besar di tubuh DPP PKB hal ini juga berimbas pada banyak kader didaerah, tak terkecuali di tubuh DPW PKB DIY. Banyak kader yang kurang sependapat dengan hasil muktamar II di semarang dan tetap loyal terhadap alwi sihab dkk sebagai ketua umum dewan tahfidz. Kelompok ini juga cukup banyak di DIY yang nantinya menjadi tulang punggung berdirinya DPW PKNU DI DIY mereka antara lain Hj Ida

---

<sup>130</sup> Lihat hal lampiran : surat keputusan no.01845/DPP-02/III/A.I/II/2005 Yang mengangkat pengurus DPW PKB DIY 2005-2010



**fauziah ZA** yang dulu pernah menjadi PJS dewan tahfidz DPW PKB DIY yang juga tercatat sebagai anggota DPRD I DIY Priode 2004-2009. Tentunya hal ini tidak di kehendaki oleh pengurus di internal DPW PKB DIY dan DPP PKB. Maka pada tanggal 21 maret 2007 dan 17 april 2007 mengadakan rapat gabungan tentang evaluasi kinerja pengurus dalam rangka meningkatkan evaluasi kinerja pengurus dalam rangka meningkatkan fungsi, peran dan tanggung jawab sebagai pengemban amanah partai, maka DPW PKB DIY memutuskan untuk mengganti dan mereposisi personalia pengurus<sup>131</sup>, maka berdasarkan keputusan tersebut Hj. Ida fauziah ZA yang duduk sebagai anggota DPRD I DIY sebagai wakil PKB dari kabupaten bantul di PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh **Sukoyo S.ag** yang pada pemilu 2004 berada di bawah Hj. Ida fauziah ZA dan menjabat sebagai sekretaris dewan tahfidz DPW PKB.

Permasalahan konflik di tubuh DPW PKB Tidak berhenti sampai di sana saja. konflik yang terjadi di DPP PKB pun kembali berpengaruh pada kepengurusan DPW PKB DIY yang juga ahirnya memiliki dua kepengurusan di DPW PKB DIY antara kelompok yang pro Gus Dur (ketua DPW PKB DIY 2005-2010 H.Agus Wiyarto dkk) dan kelompok yang pro terhadap muhaimin (Sukamto, Agus Sulis - Anggota DPR RI 2009-2014-dkk). Karena konflik ini terjadi sudaah sangat dekat dengan pelaksanaan pemilu 2009 imbasnya adalah Dua kubu pengurus PKB DIY mendaftarkan dan menyerahkan daftar calon legislatif ke Kantor KPU DIY. Petugas dari KPU DIY sendiri menerima semua berkas yang diajukan dua pengurus DPW

---

<sup>131</sup> Lihat hal lampiran tentang surat keputusan No 2168/DPP-02/IV/A.I/2007

PKB DIY pendukung Muhaimin Iskandar maupun Gus Dur sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Setelah Menkum Ham mengesahkan Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB sesuai dengan keputusan Menkumham RI no M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005. SK itu juga mengesahkan Lukman Edy sebagai Sekjen Dewan Tanfidz DPP PKB. Maka PKB muhaimin Melakukan langkah langkah berikut untuk DPW PKB DIY “mengembalikan kepengurusan DPW PKB DIY seperti hasil muswil 2005 dimana **Sukanto SH** sebagai pemenang”<sup>132</sup>

Terlepas apapun motif sebuah konflik dalam partai politik maka yang menjadi akar masalahnya adalah kepentingan-kepentingan semata. Kepentingan individu/ kelompok yang merasa terganggu bahkan berbenturan dengan individu/ kelompok yang lain adalah keniscayaan lahirnya konflik dalam sebuah partai. Adigum “tidak ada kawan sejati dalam politik, yang ada adalah kepentingan-kepentingan semata” menjadi sebuah realitas sosial politik yang mampu membangun realitas politik.

Benturan kepentingan politik pada pihak yang sedang mengalami konflik pada suatu partai akan menjadi kontra produktif bagi partai yang bersangkutan. Yang dituntut dari para kader-kader partai politik yang sedang berkonflik adalah kedewasaan dalam berpolitik, yaitu menempatkan aturan-aturan, norma-norma yang ada dalam partai tersebut sebagai spirit perjuangan politik. Kepentingan politik individu/ kelompok harus tunduk pada kepentingan partai, proses untuk menemukan

---

<sup>132</sup> Lihat Juga Berita Dalam <http://www.lintasberita.com/go/146219>

kepentingan mana yang merupakan kepentingan partai memang harus melalui “konflik-konflik” politik, namun yang terpenting adalah muara dari konflik ini harus menuju sebuah kondisi harmoni.

Konflik internal yang terjadi di PKB yang berkepanjangan membuat suara PKB pada pemilu 2009 menurun. Efek konflik internal ini merugikan partai sendiri, bagai mana tidak, efek dari konflik ini adalah menurunnya suara PKB pada pemilu 2009. ketika partai lain sibuk berkonsolidasi guna memenangkan pemilu yang di lakukan mulai DPP hingga ke daerah namun PKB malah lebih di sibukan dengan konflik yang tak berujung hingga pemilu 2009 di mulai.

**b. Eksodus besar-besaran para tokoh PKB ke PKNU dan beberapa partai lain.**

Disinyalir penurunan suara PKB pada pemilu 2009 ini kemungkinan besar terjadi karena banyaknya aktor-aktor politik PKB yang pindah ke partai lain seperti PKNU,

Lahirnya PKNU sendiri tidak dapat di lepaskan dari proses konflik yang terjadi dalam tubuh PKB pasca muktamar ke 2 yang di adakan di semarang. Secara resmi PKNU berdiri tanggal 21 Nopember 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur. Kelahiran PKNU disepakati melalui akad dan mufakat (ittifaq) sejumlah ulama atau kiai, yang oleh karenanya partai ini menyebut diri sebagai partai kiai.

Namun, Embrio pendirian partai ini sudah ada beberapa bulan sebelumnya, tepatnya ketika para kiai/ulama dalam rapat di Surabaya tanggal 6 September 2006 memberikan mandat kepada KH Abdullah Faqih (Langitan, Widang, Tuban) dan KH Abdurrochman Chudlori (Tegalrejo, Magelang) mempersiapkan pendirian partai baru setelah tak sejalan lagi dengan tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).<sup>133</sup>

PKNU Selaku partai yang secara fakta politik berdirinya tak lepas dari konflik internal di PKB, sulit bagi partai ini untuk mencegah publik menyebutnya sebagai partai sempalan PKB.

Alasan Banyaknya tokoh NU yang dulu sebagai garda terdepan dalam pembentukan dan pendirian partai kebangkitan bangsa dengan pindahnya ke PKNU tersebut mereka bisa membenahi sistem yang baru mereka bangun sehingga bisa menjadikan politik di Indonesia bisa berangsur membaik. Disamping itu mereka beranggapan bahwa partai baru yang sama-sama beraliran nahdhiyin tersebut lebih bisa mengagregasi kepentingan dan kebutuhan rakyat dari pada partai terdahulunya yaitu PKB<sup>134</sup>.

Lahirnya PKNU didorong oleh keinginan para ulama untuk memperbaiki keadaan bangsa dan negara yang mengalami keterpurukan berkepanjangan di semua sektor kehidupan. PKNU menghendaki terciptanya tatanan sosial dan politik di

---

<sup>133</sup> [http://koran.republika.co.id/berita/22433/PKNU\\_Parpol\\_Baru\\_Dengan\\_Target\\_Tinggi](http://koran.republika.co.id/berita/22433/PKNU_Parpol_Baru_Dengan_Target_Tinggi)

<sup>134</sup> Amin, ma'ruf. *kenapa harus memilih PKNU -20 hujjah (alasan) pendirian Partai Kebangkitan Nasional U lama*; DPP PKNU, Jakarta : 2007

Indonesia selaras dengan Visi keagamaan Ahlu-Sunnah wal-Jamaah sehingga tercapai harmonisasi serta menghindari benturan antara agama dan negara (*li-ishlaahil ummah diniyyatan wa ijtima'iiyyatan, iqtishodiiyyatan wa siyaiyyatan, fikriyyatan wa akhlaqiiyyatan*).

Selain itu alasan mengapa harus mendirikan dan melahirkan PKNU dan tidak menjadikan partai politik yang sudah ada untuk menyalurkan aspirasi politik warga nahdliyin khususnya dan seluruh umat islam dan bangsa indonesia pada umumnya karena partai partai politik yang sudah ada tidak ada yang memiliki struktur dan platform (*laa stukturiyyan wa la platformiyyan*) yang sesuai dengan tanggung jawab para ulama. Bagi mereka tidak ada partai politik yang memberikan peran penting bagi ulama, yang ada hanya partai politik yang menjadikan ulama sebagai pelengkap dan alat legitimasi belaka.<sup>135</sup>

Untuk itulah para ulama bersepakat (*ittifaq*) untuk mendirikan PKNU sebagai wadah politik untuk memperjuangkan warga nahdhiyin. PKNU berangkat dengan visi keagamaan. Ini adalah warna politik baru yang jauh dari arogansi kekuasaan karena di kawal oleh para ulama.<sup>136</sup>

Tokoh tokoh yang dulunya merupakan tokoh sentral di PKB dan menjadi panutan umat (konstituen PKB) secara nasional adalah : Tim Tujuh\_Belas yang

---

<sup>135</sup> *ibid.*, hal 10

<sup>136</sup> Amin, ma'ruf. *kenapa harus memilih PKNU -20 hujjah (alasan) pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama*; DPP PKNU, Jakarta : 2007

melahirkan PKNU merupakan representasi para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU).

Secara nasional, Mereka adalah:

- KH. Abdullah Faqih (Langitan, Widang, Tuban, Jawa Timur)
- KH. Ma'ruf Amin (Tanara, Banten)
- KH. Abdurrochman Chudlori (Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah)
- KH. Ahmad Sufyan Miftahul Arifin (Panji, Situbondo, Jawa Timur)
- KH. M. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa Timur)
- KH. Ahmad Warson Munawwir (Krapyak, DI Yogyakarta)
- KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung, Jawa Tengah)
- KH. Abdullah Schal (Bangkalan , Jawa Timur)
- KH. Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur)
- KH. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri Jawa Timur)
- KH. Chasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah)
- KH. Abdul Adzim Abdullah S MA (Mapang Prapatan, DKI Jakarta)
- KH Mas Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan, Jawa Timur)
- KH. A. Humaidi Dahlan, Lc (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

- KH. M. Thahir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan)
- Habib Hamid bin Hud Al Atthos (Cililitan, DKI Jakarta)
- KM. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah)

### c. Rendahnya kinerja anggota pengurus PKB

Rendahnya kinerja anggota pengurus PKB di tandai dengan Kurangnya komunikasi dan konsolidasi dari jajaran internal pengurus PKB mulai dari DPW-DPC hingga pengurus ranting, yang berimbas pada kinerja partai dan caleg dari PKB yang tidak masive dan terkesan sporadis.

Kenyataan pahit ini harus terjadi di tubuh DPW PKB DIY sebagai konsekuensi dari konflik yang terjadi di dalam internal DPW PKB DIY. Memang benar muara konflik di internal DPW PKB DIY ini tidak dapat di lepaskan dari pengaruh DPP PKB yang terjadi sejak tahun 2005. Namun konflik yang berkepanjangan itu juga yang menyebabkan ketidak solitan antar caleg yang di usung PKB dalam menghadapi pemilu dan mengurangi konsolidasi dari jajaran internal pengurus PKB mulai dari DPW-DPC hingga pengurus ranting, yang berimbas pada kinerja partai dan caleg dari PKB yang tidak masive dan terkesan sporadis. bahkan kondisi demikian terjadi menjelang tahapan pemilu di mulai, Di internal DPW PKB DIY sendiri terjadi rebutan daftar calon anggota legislatif yang akan di ajukan ke

KPUD DIY sebagai kontestan pemilu 2009. Perebutan daftar calon legislatif itu terjadi antara caleg PKB dari kubu Gus Dur dan PKB kubu Muhaimin,

Meskipun sudah ada keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta Nomor M. HH-67.AH.11.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Juli 2008 mengesahkan kepengurusan yang sah PKB, dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal Lukman Edy. Namun hal itu tidak berarti semua kader di daerah langsung bergabung ke PKB muhaimin, karena masih ada banding dari pihak PKB kubu Gus Dur, hal inilah yang mengakibatkan terjadi tarik menarik mengenai siapa yang berhak mengajukan calon legislatif ke KPUD DIY.

Setelah adanya ketetapan dan keputusan yang mengikat mengenai siapa siapa calon legislatif yang dapat di ajukan ke KPUD DIY, hal itu bukan berarti permasalahan selesai, karena waktu konsolidasi partai dan caleg sudah terlanjur yang sangat mepet terhadap pelaksanaan pemilu 2009 sehingga berimbas pada kinerja partai dan caleg dari PKB yang tidak masive dan terkesan sporadis untuk menghadapi pemilu. Tentunya dapat di tebak hasilnya kemudian, bahwa suara Partai kebangkitan bangsa di DIY mengalami penurunan pada pemilu 2009 di bandingkan pada pemilu 1999 dan 2004 dan mengalami penurunan jumlah perolehan kursi dari 6 kursi DPRD I menjadi 5 kursi DPRD I.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Lihat juga data-data yang di sajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang ada di latar belakang masalah BAB 1 hal 4-9.



#### d. politisi PKB kurang aspiratif

Politisi PKB kurang aspiratif ini dapat di tandai dari Ketidak mampuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik dan anggota dewan dari PKB dalam menjawab ekpektasi *-harapan-* dari masyarakat.

Kinerja DPRD penting untuk dinilai karena mereka turut memberikan kontribusi bagi maju tidaknya pembangunan di daerah. Terkait dengan fungsi penganggaran, tanpa persetujuan DPRD, anggaran pembangunan yang diajukan eksekutif tidak bisa keluar. Praktis, program daerah tidak bisa dijalankan. Legislatif adalah mitra eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Tahun 2009 merupakan masa kerja terakhir jabatan mereka. Karena itu, dipandang sangat perlu kembali menilai kinerja anggota DPRD selama lima tahun mengemban amanat konsituen. Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD dilakukan untuk mengevaluasi kinerja anggota DPRD untuk periode jabatan 2004-2009 khususnya para anggota DPRD I dari PKB yang ada di DIY.

Bagaimana dengan konstituen PKB di DIY? Ketidakpuasaan masyarakat luas khususnya terhadap kinerja DPRD masih sangat rendah.sebagai contoh, konstituen PKB di DIY khususnya mayoritas berasal dari basis kultur pesantren dengan NU nya dan masyarakat petani, maupun pedesaan namun pada kenyataanya para wakil-wakil mereka yang duduk di parlemen baik tingkat provinsi maupun kabupaten tidak bisa memunculkan kebijakan kebijakan yang mengayomi mereka.sehingga muncul kesan

di konstituen PKB dengan “*ada atau tidak adanya wakil dari mereka di parlemen terasa sama saja*”<sup>138</sup>

Masyarakat (konstituen PKB) menilai kinerja DPRD masih sangat buruk. Penelitian itu melibatkan responden yang secara pribadi penulis mengenalnya sebagai konstituen PKB pada pemilu 2004. Konstituen yang di ajak diskusi oleh penulis berasal dari latar belakang yang cukup berbeda (santri, santri mahasiswa. Aktivis kepemudaan NU. Ustad, pedagang kecil, dan masarakat biasa)

Di fungsi legislasi, DPRD gagal mendorong terbitnya peraturan daerah (perda) yang berpihak kepada kepentingan publik. Misalnya saja, perda yang tidak membebani masyarakat, mampu mempercepat pembangunan di daerah, dan meningkatkan pelayanan publik. Faktanya, banyak perda yang terbit di daerah justru merupakan perda retribusi. Perda-perda itu terbukti bisa membebani dunia usaha. DPRD juga dinilai gagal dalam menjalankan hak mereka untuk melahirkan perda-perda inisiatif. Umumnya, usul perda masih dari eksekutif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris DPW PKB apa yang menyebabkan penurunan suara PKB pada pemilu 2009, mereka mengatakan<sup>139</sup>,

---

<sup>138</sup> Hasil diskusi dan Wawancara dengan masarakat (konstituen PKB) yang berada di pondok pesantren krapyak, pondok pesantren wahid hasyim Yogyakarta, kos-kosan sekitarnya dan rumah penduduk yang secara pribadi penulis mengenalnya sebagai konstituen PKB pada pemilu 2004 yang di lakukan dari tanggal 25 Oktober 2009-15 november 2010.

Khusus di DIY penurunan ini saya kira impek atau imbas dari konflik DPP PKB pusat yang ke dua ekspektasi masyarakat atau konstituen PKB belum dapat terjawab secara baik, baik oleh partai maupun anggota dewan. Dua elemen ini yang sesungguhnya seharusnya bertanggung jawab terhadap penurunan itu.

Dari pernyataan itu dapat diartikan bahwa produk regulasi (perda) yang dihasilkan tidak mampu mengangkat kualitas hidup masyarakat. Responden juga tidak setuju bahwa pengawasan terhadap eksekutif dan birokrasi telah menciptakan pemerintahan yang efektif dan bersih. Terakhir, masyarakat menilai alokasi anggaran yang dikawal dan ikut ditentukan DPRD belum berpihak pada masyarakat.

Makin terbukalah wajah DPRD sesungguhnya. Selain menyangkut jeleknya kualitas kinerja, persoalan rendahnya integritas terus menyertai perjalanan DPRD. Dengan demikian, perbaikan dua masalah utama tersebut harus diupayakan untuk kedepannya.

Dari permasalahan internal yang menjadi faktor penyebab penurunan suara PKB khususnya di DIY seperti sudah di kemukakan di atas tidak dapat di lepaskan dari teori Hubungan konstituen, manajemen pengelolaan parpol, pengurus parpol, dan akibat ditimbulkannya digambarkan dalam diagram alur berikut ini<sup>140</sup>.

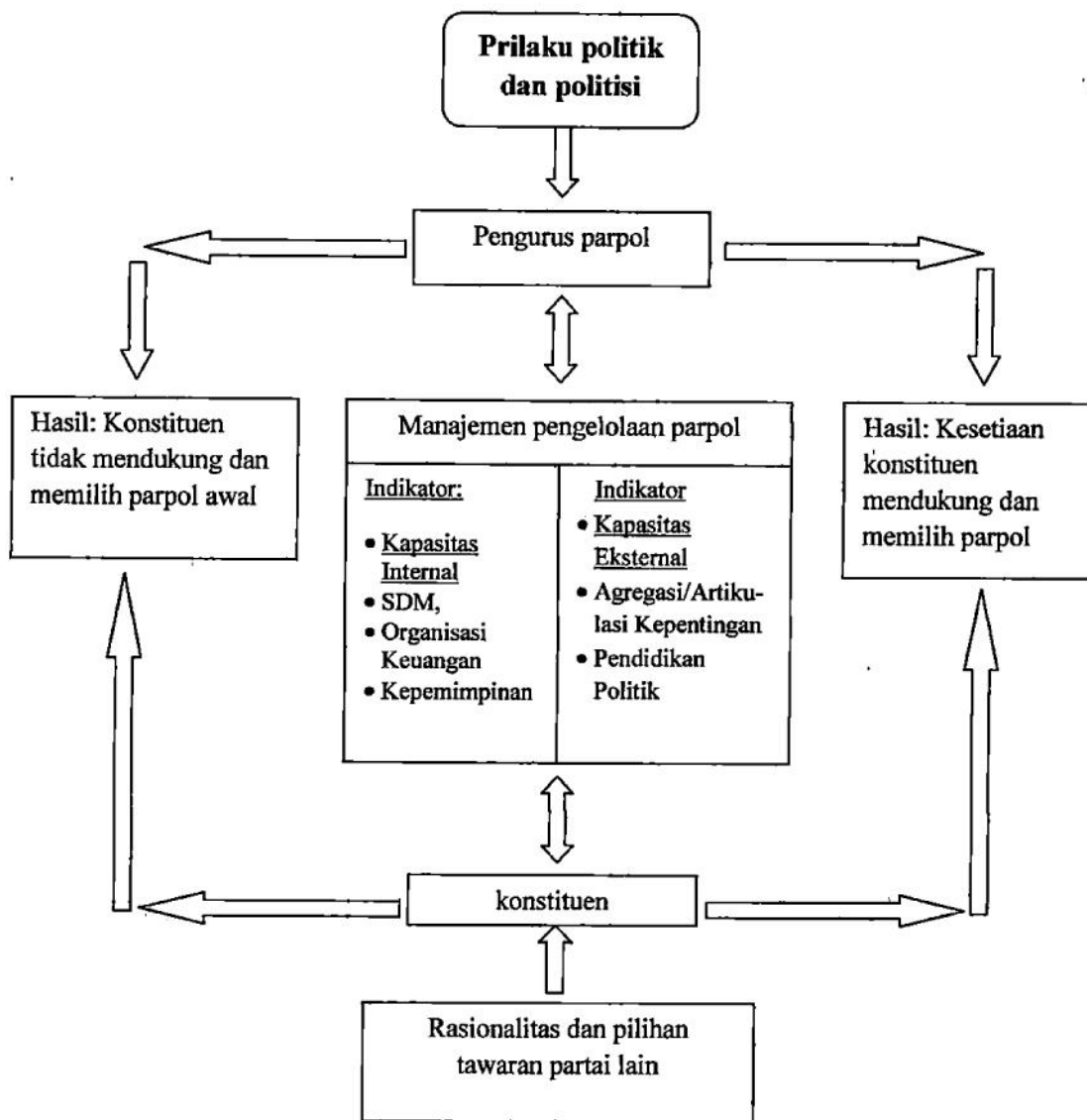
---

<sup>139</sup> wawancara bersama sekretaris DPW PKB provinsi Yogyakarta (sukoyo-cp 08122702653), di lakukan di kantor DPW PKB pada hari Kamis 28 Oktober 2010

<sup>140</sup> Hasil kompilasi dan rekonstruksi atas pemikiran Hans-Dieter, Alan Ware, Bob. S Hadiwinata, dan Eef Saefullah Fatah.

bagian 3.2

Hubungan konstituen, manajemen pengelolaan parpol, pengurus parpol, dan akibat ditimbulkannya digambarkan dalam diagram alur berikut ini



Dari gambar di atas terlihat bahwa konstituen yang umumnya pasif, menunggu, namun rasional (bisa menilai dan membandingkan); biasanya, menurut

Hans-Dieter, memiliki kecenderungan merespon kinerja pengurus parpol. Apabila pengurus parpol melaksanakan manajemen pengelolaan parpol dengan baik, maka konstituen meresponnya dengan baik pula, dan hasilnya jelas konstituen tetap setia (bahkan mengajak yang konstituen lain) untuk mendukung dan memilih parpol pilihannya tersebut. Sebaliknya, apabila pengurus parpol melaksanakan manajemen pengelolaan parpol dengan buruk, maka konstituen meresponnya dengan buruk pula, dan hasilnya jelas konstituen tidak setia (bahkan mengajak yang konstituen lain) untuk tidak mendukung parpol awal dan memilih parpol lain dalam pemilu.

Kinerja dan manajemen pengelolaan parpol yang dilakukan oleh pengurus parpol di Provinsi DIY ini direspon secara positif oleh sebagian besar konstituen dan ada yang direspon pula secara negatif. Respon positif bermakna konstituen akan tetap setia mendukung partai tersebut dalam pemilu legislatif 2009. Respon negatif bermakna konstituen akan mengalihkan dukungannya ke partai lain. Pada pemilu legislatif 2009 yang lalu terdapat fakta ada beberapa partai politik yang mengalami penurunan dan penambahan suara apabila di bandingkan dengan pemilu 2004 yang lalu.<sup>141</sup>

Dan untuk partai kebangkitan bangsa sendiri dengan membandingkan data statistik rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 2009 di bandingkan dengan data

---

<sup>141</sup> Data hasil Pemilu Legislatif Provinsi DIY 1999 menunjukkan bahwa PDIP memperoleh 35,9%, PAN (17,3%), Partai Golkar (14,3%), PKB (14,2%), PPP (4,8%), dan PK (1,6%). Data hasil Pemilu Legislatif Provinsi DIY 2004 menunjukkan perubahan suara PDIP (17,15%) PAN (11,4%) Partai Golkar (9,40%), dan PKB (6,2%). Pks (4,8%) dan pada pemilu 2009 mengalami penurunan kembali, untuk lebih detailnya silahkan lihat pada BAB 1 hal 7,8 dan 9. Sumber data: di olah dari data perolehan suara pemilu KPUD DIY

pemilu 2004 maka dapat di ambil kesimpulan Kinerja dan manajemen pengelolaan parpol yang dilakukan oleh pengurus parpol direspon secara negatif, Respon negatif bermakna konstituen akan mengalihkan dukungannya ke partai lain, hal ini dapat di buktikan dari angka penurunan suara PKB dan perolehan kursi di DPRD DIY dari 6 kursi pada masa bakti 2004-2009 menjadi 5 Kursi DPRD DIY pada masa bakti 2009-2014.

**e. Golongan putih atau golongan masarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu 2009**

Fenomena gol-put atau golongan masarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ketika pemilu 2009 baik secara sengaja (*atas kehendak sendiri tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu* ) maupun karena tidak di sengaja (*terjadi karena tidak terdaftar menjadi daftar pemilih tetap pemilu 2009*) yang terjadi saat pelaksanaan pemilu 2009 tampaknya juga berpengaruh dalam perolehan suara PKB DI DIY, fakta ini di peroleh oleh penulis ketika melakukan penelitian dengan metode wawancara dan diskusi ringan dengan konstituen PKB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan konstituen PKB pada pemilu 2004, apa yang melatar belakangi keputusan anda untuk tidak kembali memilih partai ini? sikap responden ketika pemilu 2009? Apakah anda memilih partai lain (misal PKNU, PPP, demokrat, atau yang lainnya? mereka mengatakan:

Saya malu terhadap perilaku pengurus PKB yang gemar sekali berkonflik, padahal mereka kan satu organisasi, satu partai dan juga sama sama "*wong islam dan*

NU" yang juga mengerti agama, tapi apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan sikap ukhuwah islamiah yang selalu menjaga persaudaraan.

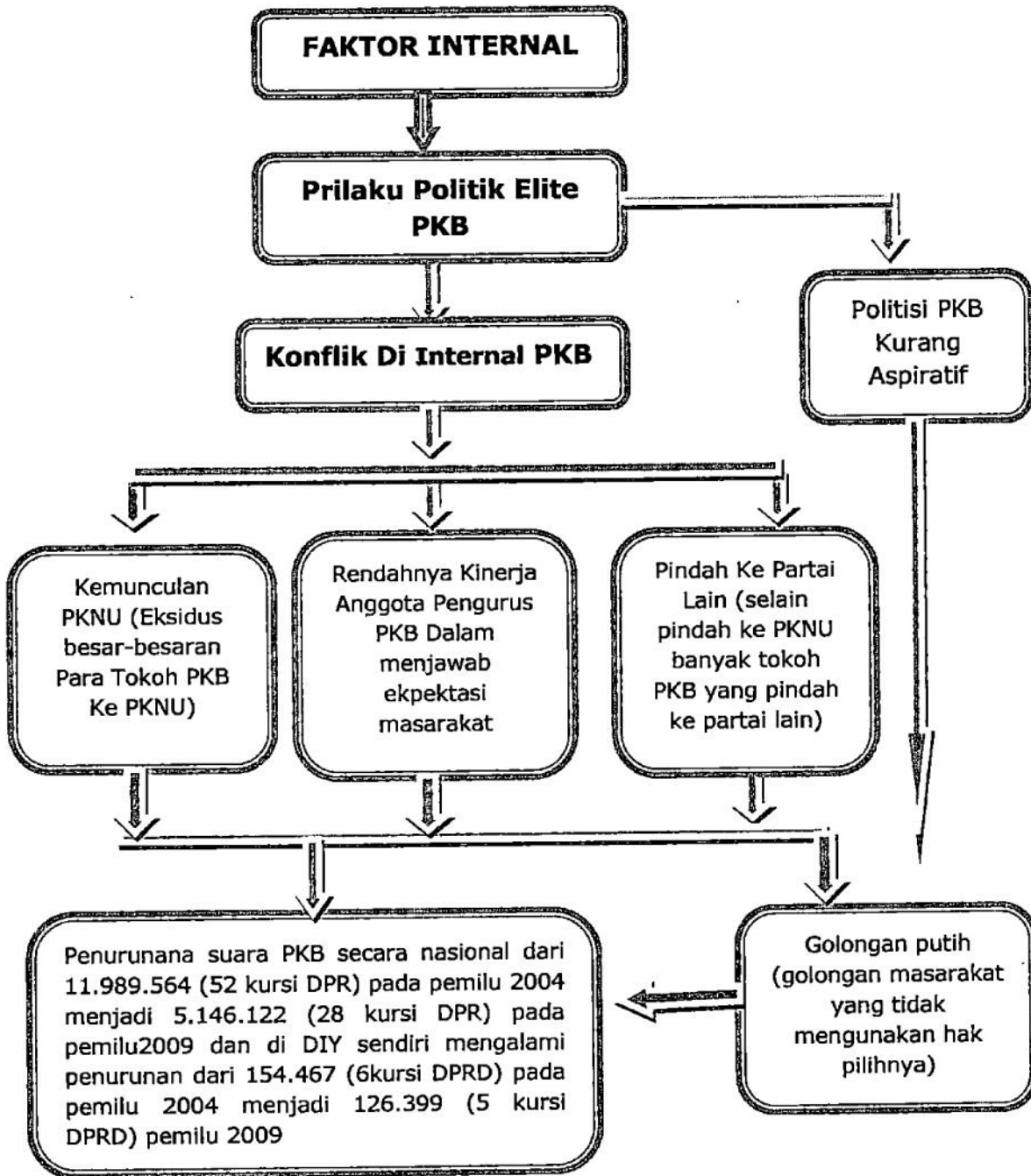
Saya secara pribadi gol put karena males untuk ikutan milih, selain itu saya bingung mau milih partai apa karena semua sama saja. Hanya manis di mulut ketika kampanye setelah mereka jadi lupa sama yang milih. selain itu kan PKB sendiri ada dua PKB muhaimin dan gus dur yang tidak bisa mengikuti pemilu dan meng anjurkan Gol put

Namun secara pribadi penulis harus jujur tidak mengetahui berapa persen suara PKB yang hilang akibat: (a) kurangnya komunikasi dan konsolidasi dari jajaran internal pengurus PKB mulai dari DPW-DPC hingga pengurus ranting, yang berimbas pada kinerja partai dan caleg dari PKB yang tidak masive dan terkesan sporadis.(b)ketidak mampuan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik dan anggota dewan dari PKB dalam menjawab ekpektasi masarakat.(c) Golongan Putih. hal ini karena memerlukan kajian dan penelitian yang mendalam lagi, namun faktanya perolehan suara PKB DI DIY mengalami penurunan cukup signifikan ketika pemilu 2009 (154.467) dibandingkan pemilu 2004(126.399).

Berikut ini adalah bagan yang dapat mempermudah penjelasan masalah faktor internal di atas sebagai faktor penurunan suara PKB pada pemilu 2009 di DIY

**Bagan 3.3**

**faktor internal penyebab penurunan suara PKB dalam pemilu 2009 di DIY**





Dari analogi bagan di atas yang menjadi faktor sangat dominan sebagai penyebab penurunan suara PKB pada pemilu 2009 di DIY adalah konflik internal di tubuh PKB

### **Apa yang harus di lakukan?**

Sebenarnya memang bukan konfliknya yang substansial dalam kehidupan berkelompok, karena konflik itu natural. Namun manajemen konflik itulah yang penting untuk dicarikan metode yang tepat, terutama manajemen konflik dalam partai politik. Dalam tradisi demokrasi yang lebih mapan, konflik internal dalam satu partai itu disalurkan misalnya lewat mengakui dan menerima adanya faksi-faksi politik, dan lewat tradisi 'challenge' untuk memilih pimpinan baru.

### **Tradisi faksi dalam partai politik<sup>142</sup>**

Sejak awal sebuah partai politik perlu sadar bahwa di dalam tubuhnya akan ada atau akan muncul aliran-aliran, kelompok-kelompok 'interest', atau apa pun yang lebih kecil. Meski secara umum semua aliran atau kelompok tersebut masih memiliki sebuah latar belakang atau tujuan besar yang mirip, dan oleh karenanya berkelompok dalam sebuah partai. Akan tetapi pengelompokan ke dalam grup yang lebih kecil tersebut tidak boleh diingkari. Dengan menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat atau akan terdapat aliran dan kelompok-kelompok yang berbeda, partai politik

---

<sup>142</sup> <http://www.safiramachrusah.blogspot.com/2008/11/manajemen-konflik-dalam-partai.html>

tersebut perlu mengakui eksistensi dari 'faksi-faksi'. Faksi inilah yang merupakan bentuk pengelompokan dalam sebuah partai politik.

Faksi-faksi dalam sebuah partai politik sesungguhnya memang diperlukan. Kenapa? Karena dengan adanya faksi-faksi itulah sebuah partai politik akan selalu dinamis. Persinggungan di antara faksi-faksi ini akan menggerakkan sebuah partai dari kejumudan. Selain itu, dinamika ini sekaligus akan menjadi kontrol internal dari partai tersebut. Memang persinggungan itu akan menjadi faktor destruktif apabila tidak dapat dikelola. Namun mengingkari adanya faksi justru akan menjadi awal dari konflik internal yang berkepanjangan.

#### **Tradisi 'challenge' untuk menyelesaikan perbedaan antar faksi**

Dengan mengakui dan menerima adanya faksi-faksi politik dalam sebuah partai, maka selanjutnya perlu mekanisme bagaimana kepentingan faksi-faksi ini bisa diartikulasikan. Dalam tradisi yang lebih berkembang, perbedaan tersebut diakomodasi lewat tradisi seperti tradisi 'challenge'. *Tradisi ini berbentuk upaya perebutan pimpinan partai lewat pemilihan ulang pimpinan partai di antara internal 'pimpinan partai atau faksi dalam kelompok (party room).*<sup>143</sup> Memang, dalam tradisi kepartaian di Indonesia, hal terakhir ini biasa dilakukan lewat Muktamar Luar Biasa (MLB), Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atau apapun namanya. Namun proses tersebut selama ini sangat mahal karena melibatkan sangat banyak orang.

---

<sup>143</sup> Ibid.

Sampai-sampai ribuan orang ikut serta, dan bahkan membuat seperti sebuah pasar malam. Ia menguras tenaga, pikiran dan uang. Lebih dari itu, MLB atau Munaslub ini justru sering tidak melibatkan faksi-faksi yang berseberangan. Anggota-anggota legislatif dari partai tersebut sering justru tidak bisa ikut bersuara. Karena misalnya, setelah menjadi anggota DPR-RI dia bukan lagi pengurus harian partai baik di pusat maupun di daerah, sehingga tidak punya hak suara. Padahal dari antara merekalah banyak perbedaan kepentingan itu muncul.

Dengan kondisi seperti ini, MLB dan Munaslub pada akhirnya lebih mengecilkkan arti aliran atau pengelompokan yang saling berbeda, bukan untuk menyadari dan menerimanya sebagai sebuah kenyataan. Sehingga, yang terjadi, setelah MLB, aliran atau kelompok yang tidak puas keluar dari partai dan tidak jarang membangun sebuah partai baru. Di sisi lain partai utama kemudian didominasi oleh kelompok para pemenang.

Gagasan challen ini sebetulnya sudah pernah di lontarkan oleh KH Mustofa Bisri, yaitu gagasan untuk melakukan muktamar ulang dan di ikuti oleh semua pihak yang berkonflik, mulai dari kubu alwi shihab gusipul dkk, kubu alm Gus dur (yeni wahid, ali maskhan musa dkk) hingga kubu Muhaimin Iskandar dkk dan dengan menghadirkan sesepuh sesepuh PKB, para alim ulama' kyai-kyai sepuh dan para deklarator PKB yang masih hidup. dengan catatan semua pihak yang berkoflik mau melepas ego masing-masing dan dengan perlakuan yang sama. Dengan asumsi kesetaraan semua pihak, baik derajat legitimasi politik maupun "keabsahan hukum"-

nya, masing-masing dapat menempatkan muktamar bersama itu sebagai Muktamar Luar Biasa atas dasar AD/ART yang berlaku. Dan nantinya di putuskan AD/ART PKB yang dapat menjembatani deadlok yang terjadi di tubuh PKB selama ini.

*Siapa yang mengikuti muktamar luar biasa ini?*

Karena gagasan challen ini adalah *Tradisi ini berbentuk upaya perebutan pimpinan partai lewat pemilihan ulang pimpinan partai di antara internal 'pimpinan partai' atau faksi dalam kelompok (party room).*<sup>144</sup> Maka semua orang-orang tokoh PKB masa sekarang maupun masa lalu yang pernah menjadi tokoh PKB Dan juga di hadiri oleh para alim ulama kharismatik NU yang masih mau untuk memperbaiki kondisi PKB sebagai sayap politik NU yang sedang carut marut karena konflik.

#### **Perlu kesadaran demokrasi baru**

Perlu di sadari disadari bahwa konflik merupakan sesuatu yang natural. Dan pada masanya akan muncul lagi baik di partai baru maupun di partai utama, konflik baru akan selalu terjadi karena perbedaan kepentingan. Sebagai misal saja, di PBR yang tadinya menjadi rival PPP, kemudian muncul pula konflik antara Zaenuddin MZ vs. Zaenal Ma'arif lalu Zaenal Ma'arif vs. Bursah Zarnubi. Kalau PKB tetap mengikuti cara yang selama ini terjadi, maka akan muncul terus banyak partai, dan partai yang makin lama makin kecil. Satu hal yang kurang sehat untuk kehidupan demokrasi dan bernegara.

---

<sup>144</sup> Ibid.,

Sebaliknya, kalau PKB mulai sadar dan mau menerima kenyataan bahwa faksi-faksi politik merupakan keharusan dalam berkelompok, jalan akomodasi bisa ditempuh. Kalau metode manajemen konflik seperti ini bisa diterima, kehidupan berpartai akan bisa lebih langgeng. Kalau kepentingan beberapa aliran bisa diakomodasi maka setidaknya pihak-pihak yang berkonflik bisa sedikit tenang. Kalau pun nantinya harus melakukan 'challenge' pun, semua pihak baik yang akan menang atau pun yang akan kalah tetap siap, karena ada keyakinan bahwa berbagai pihak ini masih akan diakomodasi kepentingannya.